

Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DOK terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Yeni Nur'aeni¹, Suratno²

^{1,2}Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

INFO ARTIKEL

JEL Classification:

H83

M12

Keywords:

pendapatan domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus.

A B S T R A C T

PDRB is defined as a number of additional values that is resulted of whole effort units in a region or as whole numbers of the final goods and fees from the entire of economic units of a region. PDRB's level is able to describe a regional economic growth. The height of economic growth level is appointed with the height of value's level of PDRB, in which is that region has economic progress. PAD, DAU, DAK, and DOK are the factors which have contribution into PDRB construction. According to that the purpose of this research is to identify how many influences among PAD, DAU, DAK, and DOK to PDRB in the Papua province. In doing this research is used multiple regression analysis method by using 5 years data of PAD, DAU, DAK, and DOK during 2009 to 2013. There are significant research result PAD, DAU, DAK and DOK to PDRB.

A B S T R A K

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit effort di wilayah atau sebagai nomor seluruh barang akhir dan biaya dari seluruh unit-unit ekonomi suatu daerah. Tingkat PDRB adalah mampu menggambarkan pertumbuhan ekonomi regional. Tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan tingkat nilai tentang PDRB, di mana adalah bahwa daerah memiliki kemajuan ekonomi. PAD, DAU, DAK, dan DOK merupakan faktor yang memiliki kontribusi dalam pembangunan PDRB. Menurut bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berapa banyak pengaruh antara PAD, DAU, DAK, dan DOK terhadap PDRB di provinsi Papua. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode multiple regresi. Alat analisa dengan menggunakan 5 tahun data PAD, DAU, DAK, dan DOK selama 2009 hingga 2013. Ada signifikan hasil penelitian PAD, DAU, DAK dan DOK terhadap PDRB.

1. Pendahuluan

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan nilai tambah

yang dihasilkan oleh seluruh unit dalam suatu daerah tertentu atau merupakan nilai jumlah barang atau jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi. Kondisi PDRB Provinsi Papua selama periode penelitian menunjukkan data yang fluktuatif, yaitu PDRB pada tahun

*Email Korespondensi: ¹yeni_nrn@yahoo.com, ²soeratno_54@yahoo.com

Magister Akuntansi Universitas Pancasila

2009 menunjukkan sebesar 76.886,68 (dalam jutaan) naik menjadi 87.733.42 (dalam jutaan) pada tahun 2010 dan menurun menjadi 76.501.34 (dalam jutaan) di tahun 2011. Fluktuatif PDRB di Provinsi Papua diindikasikan dipengaruhi oleh: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Alokasi Umum (DAU), (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan (4) Dana Otonomi Khusus (DOK). Berfluktuatifnya PDRB provinsi Papua diindikasikan adanya pengaruh dari PAD, DAU, DAK dan DOK, padahal dana perimbangan/transfer dari pusat dari tahun ke tahun terus meningkat. Berikut adalah data PAD dan dana perimbangan selama tahun 2009 – 2013.

Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya, hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Setyawati (2007), bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2005.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu komponen di dalam Dana Perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas formula dengan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). DAU bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah horizontal imbalance yang dialokasikan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (*block grants*), hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Maryati dan Endrawati (2010), yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Barat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yaitu untuk membiayai

investasi dan infrastruktur yang dalam jangka panjang akan meningkatkan PDRB suatu daerah, hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Friska Sihite (2012), bahwa DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian di lakukan di Provinsi Sumatera Utara. Bergulirnya Otonomi Daerah yang dimulai dengan lahirnya UU Nomor 22 tahun 2009, membawa konsekuensi, salah satunya adalah dari segi aspek kinerja keuangan yang dituntut lebih akuntabel dan transparan. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi terletak pada kesiapan dan kemampuan daerah untuk menerima beban dan tanggung jawab yang dimilikinya dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan PAD nya melalui berbagai potensi yang dimiliki. Dengan kata lain, PAD pemerintah daerah yang masih rendah dan selama daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pusat, maka selain akan meningkatkan beban anggaran pemerintah pusat, otonomi yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian tersebut akan sulit untuk dilaksanakan.

Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto yaitu meningkatnya *output* per kapita dalam jangka panjang. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiataannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah Daerah diharap mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomis, efisien dan efektif termasuk perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik.

2. Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teori Anggaran

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen

penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran. Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: (a) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional; dan (b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan *New Public Management*. Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain (Mardiasmo, 2002):

1. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
2. Pendekatan *incremental* menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
3. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
4. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, *overlapping*, kesenjangan, dan persaingan antar departemen.
5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
6. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan

kolusi).

7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya *budget padding* atau *budgetary slack*.
8. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan 'manipulasi anggaran'.
9. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Beberapa kelemahan anggaran tradisional di atas sebenarnya lebih banyak merupakan kelemahan pelaksanaan anggaran, bukan bentuk anggaran tradisional.

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan *principal* (pemegang saham). Kepemilikan diwakili oleh investor yang mendelegasikan kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor. Menurut Lane (2003) dalam Abdul Halim (2006) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan *principal*. Hal senada dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman & Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*),

moral hazard, dan adverse selection. Menurut Moe (1984) dalam Abdul Halim (2006), di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan *principal-agent* yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran: pemilih-legislatif, legislatif-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan.

Teori Pendapatan Nasional

PDRB adalah jumlah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam jangka waktu tertentu. Menurut Keynes menjelaskan perhitungan pendapatan nasional dengan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Dari segi pendekatan pengeluaran, Pendapatan Nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu Negara. Sektor – sektor tersebut adalah sektor rumah tangga, sector badan usaha, sektor pemerintahan dan sektor perdagangan internasional. Teori Keynes menyatakan bahwa pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin banyak tingkat konsumsinya pula, dan tingkat tabungannya pun akan semakin bertambah dan sebaliknya apabila tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi sehingga tingkat tabungannya nol.

Sistem Hubungan Keuangan Pusat Daerah

Hubungan Keuangan pemerintah pusat dan daerah, atau dalam arti sempit sering juga disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada tiga fungsi utama yang dapat diemban oleh pemerintah suatu Negara, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut dilakukan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Fungsi alokasi meliputi antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan

masyarakat. Fungsi Distribusi meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi stabilisasi meliputi pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter. (Ahmad Yani;2002).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa:

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “*block grant*”, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksudkan sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana Alokasi Khusus digunakan

khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

Dana Otonomi Khusus

Undang-undang yang mengatur otonomi khusus bagi provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah UU Nomor 18 tahun 2001 dan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kebijakan Otonomi Khusus Papua pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang berarti peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya, menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Papua bagi kemakmuran rakyat Papua, diharapkan dengan kebijakan ini akan dapat mengurangi kesenjangan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi - provinsi lainnya dengan memberikan ruang lebih bagi masyarakat lokal Papua dan Papua Barat sebagai subyek utama dalam pembangunan.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Setyawati (2007) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negative terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2001 – 2005.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Maryati dan Endrawati (2010) bahwa PAD dan DAU

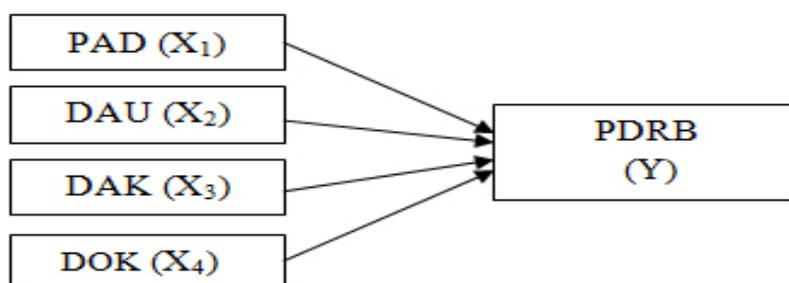
berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Sumatera Barat.

3. Penelitian yang dilakukan Friska Sihite (2012) dalam Abdul Salim bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Penelitian yang dilakukan Mawarni, Darwanis dan Syukry Abdullah (2013) bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dilakukan di 21 kabupaten/Kota di provinsi Aceh dalam kurun waktu 2005 – 2011, gambar 1.

Sesuai dengan tujuan penelitian, kajian teoritis, dan beberapa penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah :

1. H_{a1} : PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB
2. H_{a2} : DAU berpengaruh signifikan terhadap PDRB
3. H_{a3} : DAK berpengaruh signifikan terhadap PDRB
4. H_{a4} : DOK berpengaruh signifikan terhadap PDRB

Gambar 1.
Kerangka Pikir



3. Metode

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris dari pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan otonomi khusus terhadap produk domestic regional bruto. Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik yang di akses melalui website BPS berupa data PDRB, sementara untuk data APBD kabupaten/kota provinsi Papua yang terdiri dari realisasi PAD, DAU dan belanja modal, diambil dari Kementerian Keuangan yang di akses melalui website www.djkd.depkeu.go.id. Ada beberapa teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2010), antara lain: wawancara, kuesioner, observasi. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dianggap berpengaruh terhadap variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini diantaranya:
 X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)
 X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
 X_4 = Dana Otonomi Khusus (OTSUS)

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel dependen (*Dependent variabel*) merupakan variabel yang tergantung atau dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Tabel 1.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda yang bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mempermudah melakukan perhitungan secara statistik, maka semua analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan diolah dengan bantuan software SPSS 19.0. Berikut ini merupakan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DAK} + \beta_4 \text{OTSUS} + e$$

Dalam hal ini :

- Y = Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
 α = Konstanta
 β = Slope atau koefisien regresi
 PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)
 DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)
 OTSUS = Dana Otonomi Khusus (OTSUS)
 e = error

Tabel 1.
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Instrumen Penelitian
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	PDRB Harga Berlaku	Nominal	Laporan hasil pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua
Pendapatan Asli Daerah (X1)	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Nominal	Laporan APBD
Dana Alokasi Umum (X2)	DAU = AD + CF AD = Alokasi Dasar CF = Celah Fiskal	Nominal	Laporan APBD
Dana Alokasi Khusus (X3)	Maksimal 2 % dari plafon DAU Nasional	Nominal	Laporan APBD
Dana Otonomi Khusus (X4)	Diatur dengan UU Nomor 21 Tahun 2001	Nominal	Laporan APBD

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seleksi sampel dilakukan berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan pada metode penelitian. Berdasarkan Tabel 2, diperoleh 20 kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai sampel. Dengan menggunakan data times series, maka diperoleh data penelitian sebanyak 100 pengamatan.

Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar terbebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov test diperoleh hasil 0.740. Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika probabilitas signifikansi nilai unstandarized residual ≥ 0.05 . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai residual model (*unstandarized residual*) berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel-variabel bebas dalam model regresi maupun untuk menunjukkan ada tidaknya derajat kolinearitas yang tinggi diantara variabel-variabel bebas. Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	LnPAD .899	1.112
	LnDAU .614	1.629
	LnDAK .584	1.713
	LnDOK .845	1.184

a. Dependent Variable: LnPDRB

Berdasarkan Tabel 3, hasil pengujian menunjukkan nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) > 1 dengan toleransi < 1 . Hal tersebut berarti bahwa dalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji t variable independen (PAD $<$ DAU $<$ DAK $<$ OTSUS) terhadap Absolut nilai residual menunjukkan nilai diatas 0,05 kecuali PAD. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi heteroskedastisitas namun tidak parah, khususnya varian residual pada variable pendapatan asli daerah.

Untuk Uji model penelitian dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$PDRB = -6.963 + 0,923PAD + 0,466DAU - 0,758DAK + 0.681DOK + e$$

Tabel 2.
Proses seleksi Sampel berdasarkan Kriteria

No.	Kriteria	Jumlah	Akumulasi
1	Jumlah Populasi		30
2	Kabupaten/Kota terbentuk setelah tahun 2009	(10)	
3	Jumlah Kabupaten/Kota		20
4	Observasi pooled data (5 tahun x 20)		100
5	Data variable tidak lengkap (outliers)	(2)	
6	Data yang dianalisis		98

Dengan demikian persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -6.963 , berarti bila keempat variabel bebas (PAD, DAU, DAK dan DOK) konstan atau bernilai nol, maka akan menurunkan PDRB sebesar 696.3% .
2. Jika PAD naik sebesar 100% , maka akan menaikkan PDRB sebesar 92.3%
3. Jika DAU naik sebesar 100% , maka akan menaikkan PDRB sebesar 46.6%
4. Jika DAK naik sebesar 100% , maka akan menurunkan PDRB sebesar 75.8%
5. Jika DOK naik sebesar 100% , maka akan menaikkan PDRB sebesar 68.1%

Hasil uji F diperoleh nilai F sebesar 86.837 dengan signifikansi sebesar $0,000$, hal ini menunjukkan bahwa nilai $F < \alpha (0,05)$, dengan kata lain bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, DAU, DAK dan DOK berpengaruh secara simultan terhadap PDRB.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen (X) dalam menjelaskan variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi (R^2) antara nol sampai dengan satu Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R square adjusted sebesar $0,780$ atau 78% , artinya bahwa terdapat korelasi yang kuat antara variabel bebas terhadap variabel terikat, ini berarti bahwa

PDRB dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dan DOK sebesar 78% , sedangkan sisanya sebesar 22% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Sedangkan untuk pengujian Hipotesis menggunakan Uji t, dimana pengujian ini menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Adapun kriteria penolakan hipotesis didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi hasil uji t. Variabel dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansi uji $t < 0,05$ dan dikatakan tidak berpengaruh apabila nilai signifikansi $t \geq 0,05$. Tabel 4 adalah hasil uji t:

Hasil pengujian uji t pada **Hipotesis Pertama** adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil parameter statistik menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = 16.956 > t_{tabel} = 1,96$ dengan nilai signifikansi 5% atau 0.05 . Dengan demikian variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Kesimpulan menerima H_a dan menolak H_0 . Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Setyawati (2007), bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005, Ulfi Maryati (2010), bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2006, sama halnya dengan penelitian

Tabel 4.
Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6.963	2.950		-2.361	.020
lnPAD	.923	.054	.852	16.956	.000
1 lnDAU	.466	.213	.133	2.190	.031
lnDAK	-.758	.185	-.255	-4.089	.000
lnDOK	.681	.189	.187	3.599	.001

a. Dependent Variable: lnPDRB

yang dilakukan Friska Sihite (2012), PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dilakukan pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 – 2007 dan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, Darwanis dan Syukry Abdullah, bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2005 – 2011.

Hipotesis Kedua adalah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil parameter statistik menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = 2.190 > t_{tabel} = 1,96$ dengan nilai signifikansi 5% atau 0.05. Dengan demikian variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Kesimpulan menerima H_a dan menolak H_o . Hasil penelitian Ulfi Maryati (2010, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2006, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Friska Sihite (2012), DAU berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dilakukan pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 – 2007 dan namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, Darwanis dan Syukry Abdullah, bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2005 – 2011.

Hipotesis Ketiga adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil parameter statistik menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = -4.089 > t_{tabel} = 1,96$ dengan nilai signifikansi 5% atau 0.05. Dengan demikian variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Kesimpulan menerima H_a dan menolak H_o . Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap PDRB, hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Setyawati (2007), bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Friska Sihite (2012), DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dilakukan pada

Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 – 2007. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Maryati (2010), bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2006.

Hipotesis Keempat adalah Dana Otonomi Khusus (DOK) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil parameter statistik menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = 3.599 > t_{tabel} = 1,96$ dengan nilai signifikansi 5% atau 0.05. Dengan demikian variabel DOK berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Kesimpulan menerima H_a dan menolak H_o .

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa model terbukti *fit* (baik). Pengaruh masing-masing variabel yang dalam hipotesis penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,923, dan nilai $t_{hitung} = 16.956 > t_{tabel} = 1,96$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, berarti PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB diterima.

Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,466, dan nilai $t_{hitung} = 2.190 > t_{tabel} = 1,96$ dengan nilai signifikansi $0,031 < 0,05$, berarti DAU berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa DAU signifikan terhadap variabel PDRB diterima.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar -0,758, dan nilai $t_{hitung} = -4.089 < t_{tabel} = 1,96$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, berarti DAK berpengaruh terhadap PDRB. Dengan

demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap variabel PDRB diterima.

- a. Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,681, dan nilai $t_{hitung} = 3,599 > t_{tabel} = 1,96$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, berarti DOK berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa DOK berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB diterima.
- b. Dengan meningkatnya dana perimbangan itu berarti peta kemampuan keuangan Provinsi Papua mengindikasikan bahwa daerah tersebut masih tergantung dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan dari kesimpulan yang di dapat maka ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Autokorelasi pada data yang diteliti tidak dapat dihindari, karena data yang diuji merupakan data runtut waktu (*time series*) yang diuji pada suatu waktu tertentu.
- b. Pada data yang diuji terjadi heteroskedastisitas pada variabel PAD, hal ini disebabkan PAD Provinsi Papua pada kurun waktu observasi berfluktuasi. Namun meskipun terjadi heteroskedastisitas pada 1 dari 4 variabel yang diuji, distribusi nilai residualnya normal.

Berdasarkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka dapat diperoleh saran – saran sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari Autokorelasi, penelitian yang akan datang sebaiknya menghindari data runtut waktu (*times series*). Untuk menambah sampel maka pengamatan dapat diperluas dengan menambah Provinsi yang diuji atau bisa juga seluruh Provinsi di Indonesia dengan menggunakan data rata – rata selama kurun waktu tertentu.
- b. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan jumlah sampel yang lebih luas dan variabel lain yang dianggap berpengaruh terhadap PDRB. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian yang dihasilkan tersebut memiliki

cakupan yang lebih luas dan korelasi yang lebih kuat.

- c. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk ke depannya diharapkan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dapat lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran belanjanya serta memikirkan cara-cara yang inovatif dalam meningkatkan PAD dengan menggali sumber – sumber potensi yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, “Anggaran Daerah dan Fiscal Stress : Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia”, *JEBI*, Vol. 16, No. 4, 2001.
- Abdul Halim, “Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah”, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 1, Mei 2006
- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Mardiasmo, 2002, “ *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah* ”
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan atau Dana Alokasi Umum*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Ddaerah (APBD)*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor*

28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung